



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 2 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Bermasalah, Proyek Rp 29 M Diaudit

ARGA MAKMUR - Ternyata tidak hanya proyek bendungan senilai Rp 4,9 miliar yang tidak tuntas. Bahkan ada empat proyek yang juga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dilakukan audit khusus. Diantaranya proyek jalan Desa Air Pandan Putri Hijau senilai Rp 11 miliar yang juga tidak selesai dikerjakan.

Kemudian pada 2017, sebanyak tiga proyek yang tidak selesai masing-masing Rp 4,9 miliar bendungan Desa Sengkuang, Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP), Gapura Perbatasan Rp 800 juta, Jalan Desa Air Pandan Rp 11 miliar.

Satu lagi jalan Desa Kota Bani Putri Hijau Rp 13 miliar yang baru selesai di tambahkan waktu 50 hari. Itupun saat ini beberapa titik sudah

rusak bergelombang.

Keempat proyek tersebut diaudit khusus BPK, maklum nilai totalnya Rp 29,9 miliar. Nominal yang tentu saja cukup besar. Apalagi, proyek tersebut memang sudah menjadi sorotan lantaran pembayaran sudah dilakukan di atas 50 persen, sedangkan proyek diduga belum menunjukkan progres 50 persen.

Data terhimpun **RB**, kontraktor justru mengajukan penambahan pembayaran. Sedangkan dana sudah dikembalikan ke kas daerah dan tidak dianggarkan dalam APBD. Termasuk bendungan Sengkuang yang kini sebagian besar bangunan sudah ambruk.

Terkait hal itu Inspektur Inspektorat BU, Dullah, SE mengakui jika audit dilakukan oleh BPK. Meskipun

sempat beredar kabar jika audit sebagian juga dilakukan oleh Inspektorat. Secara tegas ia membantahnya.

"Semuanya diambil alih BPK. Jadi semua audit dilakukan BPK dan hasilnya langsung diserahkan ke Dinas PUPR sebagai OPD yang melaksanakan," terang Dullah, kemarin (1/7).

Namun ia belum bisa mengungkapkan apa yang menjadi hasil audit tersebut. Hal itu menurutnya menjadi wewenang Dinas PUPR dan tidak melalui Inspektorat. Audit itu juga sebagai langkah dari Dinas PUPR mengambil keputusan terkait proyek-proyek tersebut.

"Silakan langsung ke Dinas PUPR, kami tidak mengetahui perkembangan atau hasil audit BPK terkait hal itu," pungkas Dullah. (qia)